

ABSTRAK

Desa merupakan sistem pemerintahan tertua di Indonesia, karena itu Negara haruslah mengakui dan menghormati sistem pemerintahan tersebut. Melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Negara mengakui dan mengakomodasi Pemerintahan Desa. Dalam peraturan tersebut pemerintahan desa dikenal dengan kewenangan hak asal-usul. Melalui kewenangan hak asal-usul negara juga mengenalkan bentuk perlindungan hukum dalam teknokrasi modern.

Penelitian artikel ilmiah ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan Perlindungan Masyarakat Desa. Pendekatan Konsep dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa beserta tata pemerintahannya telah ada sejak dulu sebelum pemerintahan kolonial memerintah di Indonesia. Tata pemerintah desa tersebut dikenal dengan kewenangan hak asal-usul. Historis perkembangan kewenangan hak asal-usul desa mengikuti perencanaan pembangunan nasional pada masa itu. Pasca reformasi pemerintahan, ruang lingkup kewenangan hak asal-usul disesuaikan dengan sistem pemerintahan negara hukum yang berdemokrasi. UU 6/2014 mengatur bagaimana kewenangan berdasarkan hak asal-usul berkembang dalam sistem negara hukum yang berdemokrasi. UU 6/2014 telah mengatur adanya perlindungan hukum masyarakat desa dalam Pemerintahan Desa. UU 6/2014 mengamanatkan dibentuknya produk hukum lagi untuk mengatur dan memperjelas perlindungan hukum masyarakat desa.

Kata Kunci: Hak Asal Usul Desa, Perlindungan hukum, Masyarakat Desa

ABSTRACT

Village is the oldest system of government in Indonesia. Therefore, the state has to recognize and respect that system of government which is proven in The Law No.6 years 2014 about village. It describes that the village government is known as the authority of the origin rights. It introduces not only the authority of the origin rights, but also the legal protection in modern technocracy.

This research applies the statue approach and conceptual approach. From the statue approach, it is done by analyzing all the law and regulation related with the protection of the villagers. While conceptual approach is done by observing some views and doctrine developed in the law science in order to resolve the law issues facing.

This research has some conclusion. First, the village and its governance had been existed before the colonial that reigned over Indonesia. The governance was known as the authority of the origin rights. The history of the authority of the village origin rights followed the development planning at that time. After the reform of government, the scope of the authority of the origin rights based on the government system of democratic law state. Second, the Law of 6/2014 sets about the authority that bases on the origin rights developing in the system of democratic law state. The Law of 6/2014 sets the legal protection of villagers at the village government. The Law of 6/2014 instructs to establish another legal products in order to set and clarify the legal protection of the villagers.

Keyword : The Village Origin Right, Legal Protection, Villagers